

**PERSYARATAN IZIN PENYELENGGARAAN KOS-KOSAN DI KOTA
ENDE DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN
1989 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
ASRAMA/PEMONDOKAN**

SKRIPSI



OLEH

SANDRA MARIANCE KAROLINA
2015110318

PROGAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS FLORES

ENDE

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERSYARATAN IJIN PENYELENGARAAN KOS-KOSAN
DI KOTA ENDE DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 1989 TENTANG PEMBERIAN IZIN
PENYELENGARAAN ASRAMA / PEMONDOKAN**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

SANDRA MARIANCE KAROLINA

NIM: 2015110318

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISETUJUI

Pembimbing I



BERNADUS BASA KELEN, SH.,M.Hum

NIDN: 0814077102

Pembimbing II



CHRISTINA BAGENDA, SH.,M.H

NIDN: 0823036701

MENGETAHUI

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Flores**



PAULINUS SEDA, S.H.,M.H

NIDN: 0830067701

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores**



CHRISTINA BAGENDA, SH.,M.H

NIDN: 0823036701

LEMBAR PENGESAHAN

**PERSYARATAN IZIN PENYELENGGARAAN KOS-KOSAN DI KOTA ENDE
DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 1989
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
ASRAMA/PEMONDOKAN**

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Penguji

Pada Hari : Kamis

Tanggal : 3 Februari 2022

Tim Penguji

- | | | |
|------------------------------------|--------------|--|
| 1. Christiana Sri Murni, SH.,M.Hum | (Ketua) | 1.  |
| 2. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum | (Sekretaris) | 2.  |
| 3. Yohanes Pande, S.H.,M.H | (Anggota) | 3.  |
| 4. Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 4.  |
| 5. Christina Bagenda, S.H.,M.H | (Anggota) | 5.  |

MENGESAHKAN

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Flores



Raffinus Seda, S.H.,M.H
NIDN : 0830067701

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores



Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sandra Mariance Karolina
Nim : 2015110318
Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : PERSYARATAN IZIN PENYELENGGARAAN
KOS-KOSAN DIKOTA DITINJAU DARI PERATURAN
DAERAH NOMOR 15 TAHUN 1989 TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
ASRAMA/PEMONDOKAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari pernyataan tidak benar, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ende, 3 Februari 2022
Penulis



Sandra Mariance Karolina
NIM : 2015110318

MOTTO

**“MEMATUHI PERATURAN ADALAH CARA
TERBAIK MEMANUSIAKAN MANUSIA”**

(PENULIS)

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Bapak Kosmas Ngala dan Mama Mariana Taek (Alm) yang dengan hati yang tulus ikhlas dan tanpa pamrih telah dengan susah payah melahirkan, membesarkan, membimbing, mendidik dan membiayai penulis, serta Nenek Magdalena Taek yang sudah memberikan semangat dan menemani penulis.
3. Kakak dan adik tercinta, Adi Papa, Bung Papin, Nicken Kasi, Grace Bhara, Afuy Fernandes, Serlin Banggo, Della Ngala, yang telah mendukung dan membiayai penulis lewat doa dan kerja keras demi terselesaikannya penulisan skripsi ini serta selalu menantikan keberhasilan penulis.
4. Kekasih tercinta Artho Lau yang dengan penuh kasih telah menemani, membantu dan memberikan semangat serta doa bagi penulis demi keberhasilan penulis.
5. Teman-teman seperjuangan, Fakultas Hukum Angkatan 2015, Dian, Angel Biba, Ermin Mbeo, Ticha Raga yang dengan cara mereka masing-masing telah membantu dan mendukung penulis dengan penuh kesetiakawanan dan selalu menantikan keberhasilan penulis.
6. Almamater tercinta Universitas Flores
7. Bangsa dan Tanah Air Indonesia

ABSTRAK

Judul Skripsi ini adalah “Persyaratan Izin Penyelenggaraan kos-kosan di Kota Ende Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Asrama/Pemondokan” Disusun Oleh SANDRA MARIANCE KAROLINA, NIM : 2015110318.

Penyelenggaran kos-kosan di Kota Ende sebagai pemenuhan kebutuhan akan salah satu kebutuhan pokok manusia yakni tempat tinggal atau hunian sementara hingga saat ini masih jauh dari semestinya. Dalam penyelenggaraan kos-kosan sebagai suatu usaha dengan menerima pembayaran para penyelenggara kos masih belum memenuhi persyaratan penyelenggaraan kos-kosan seperti tidak memenuhi syarat penyelenggaraan dan mengurus izin penyelenggaraan sebagaimana diatur didalam Pasal 4 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Asrama/Pemondokan seperti 3 (Tiga) kos-kosan yang berada di Jalan Samratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Hingga saat ini jumlah kos-kosan yang tidak memenuhi persyaratan penyelenggaraan kos masih banyak dan tetap beroperasi tanpa ada penertiban dari pihak Pemerintah Daerah yang berwenang.

Rumusan masalah bagaimana persyaratan izin penyelenggaraan kos ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Asrama/Pemondokan dan apa faktor penghambat para penyelenggara kos tidak memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan kos-kosan di Jalan Samratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Empiris dengan pendekatan penelitian menggunakan Yuridis Sosiologis yakni ingin mengetahui persyaratan izin penyelenggaraan kos-kosan dikota Ende ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Asrama/Pemondokan. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni ingin menelaah atau mengkaji persyaratan izin penyelenggaraan kos-kosan dikota Ende ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Asrama/Pemondokan.

Kesimpulan dari penelitian ini hingga saat ini penyelenggaraan kos-kosan belum sepenuhnya memenuhi persyaratan penyelenggaraan kos yakni penyelenggara kos tidak memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan dan tidak memiliki izin dari Bupati Kepala Daerah dikarenakan faktor-faktor penyebab yang datang baik dari pihak penyelenggara kos maupun pihak pemerintah daerah yang mengakibatkan penyelenggara kos tidak menyelenggarakan kos-kosan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Asrama/Pemondokan.

Kata Kunci : Persyaratan, Izin Penyelenggaraan Kos-kosan, Peraturan.

ABSTRACT

The title of this thesis is "Requirements for a boarding house permit in Ende City in terms of Regional Regulation Number 15 of 1989 concerning the Granting of a Dormitory/Lodging Operation Permit" Compiled by SANDRA MARIANCE KAROLINA, NIM : 2015110318.

The implementation of boarding houses in Ende City as a fulfillment of the need for one of the basic human needs, namely a place to live or temporary shelter is still far from appropriate. In organizing boarding houses as a business by accepting payments, the boarding house organizers still do not meet the requirements for the implementation of boarding houses such as not meeting the requirements for organizing and managing operating permits as stipulated in Article 4 and Article 3 of Regional Regulation Number 15 of 1989 concerning Granting of Permits for Dormitory Operations. / Lodging such as 3 (three) boarding houses located on Jalan Samratulangi, Paupire Village, Central Ende District, Ende Regency. Until now, the number of boarding houses that do not meet the requirements for boarding houses is still large and continues to operate without any enforcement from the local government authorities.

The formulation of the problem is how the requirements for a boarding house permit are reviewed from Regional Regulation Number 15 of 1989 concerning the Granting of a Dormitory/Lodging Operation Permit and what are the inhibiting factors for boarding house operators not meeting the requirements in the implementation of boarding houses on Jalan Samratulangi, Paupire Village, Ende Tengah District, Ende Regency . The research method used in this research is Empirical with a sociological juridical research approach, namely wanting to know the licensing requirements for the implementation of boarding houses in the city of Ende in terms of Regional Regulation No. 15 of 1989 concerning the Granting of Permits for the Implementation of Dormitory/Lodging. The purpose of this research is to examine or examine the requirements for permits for boarding houses in the city of Ende in terms of Regional Regulation Number 15 of 1989 concerning the Granting of Permits for Organizing Dormitory/Lodging.

The conclusion from this research is that until now the implementation of boarding houses has not fully met the requirements for boarding houses, namely the boarding house organizers do not meet the requirements for implementation and do not have permission from the Regent of the Regional Head due to the causative factors that come from both the boarding house organizers and the local government. which resulted in the organizers of boarding houses not organizing boarding houses based on the provisions of Regional Regulation Number 15 of 1989 concerning the Granting of Permits to Organize Dormitory/Lodging.

Keywords: Requirements, Permits to Organize Boarding Houses, Regulations.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERSYARATAN IZIN PENYELENGGARAAN KOS-KOSAN DI KOTA ENDE DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 1989 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ASRAMA/PEMONDOKAN”.

Tulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas-tugas dalam memenuhi syarat-syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Universitas Flores. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam tulisan skripsi masih banyak dijumpai kekurangan-kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan namun dengan berbekal pada ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan serta didorong oleh bantuan dari semua pihak, maka tulisan ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan dan motivasi serta saran-saran yang telah diberikan sehingga penulis dapat sampai pada tersempurnanya tulisan ini.

Rasa terimakasih yang mendalam Penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Simon Sira Padji, M.A selaku Rektor Universitas Flores yang telah memberikan pengaruh besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
2. Bapak Paulinus Seda, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores yang telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores yang telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H selaku Ketua Progam Studi Ilmu Hukum yang telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Ketua Progam Studi Ilmu Hukum yang telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Paulinus Seda, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang juga selalu memberikan masukan serta motivasi terhadap penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Flores yang dengan caranya masing-masing telah memberikan dukungan bantuan dan motivasi kepada penulis selama melaksanakan studi di Universitas Flores.

Ende, Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Ruang Lingkup Masalah	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.6 Lokasi Penelitian	12
1.7 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Persyaratan Izin Penyelenggaraan Kos-Kosan.....	15
2.2 Definisi Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang.....	20
2.3 Asas Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	21
2.4 Sanksi Muatan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	23
2.5 Fungsi Peraturan Daerah Menurut Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	24

2.6 Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.....	25
2.7 Menurut Para Ahli.....	26
2.8 Sanksi dan Lembaga Dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Asrama/ Pemdodokan.....	28
BAB III PERSYARATAN IZIN PENYELENGGARAAN KOS-KOSAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 1989 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ASRAMA/PEMONDOKAN³²	
3.1 Persyaratan Penyelenggaraan Kos-Kosan.....	32
BAB IV FAKTOR PENYEBAB PENYELENGGARA KOS TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN DALAM PENYELENGGARAAN KOS-KOSAN.....	
	41
BAB V PENUTUP.....	
	48
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	